



Dinamika Hubungan Ketergantungan Indonesia dan Tiongkok Pasca Klaim Sepihak Tiongkok di Laut Natuna

Gravenia Rahma Safira
Universitas Indonesia
Email: gravenia20@gmail.com

*Correspondence: gravenia20@gmail.com

DOI:

10.59141/comserva.v5i2.3185

ABSTRAK

Ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara meningkat sejak klaim sepihak Tiongkok berdasarkan peta sembilan garis putus-putus. Klaim ini dianggap mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, yang menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika hubungan kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok pasca klaim sepihak di Laut Natuna. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal dan teori *complex interdependence* dari Keohane dan Nye sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat konflik maritim, ketergantungan ekonomi dan politik antara kedua negara menjadi faktor utama yang meredam eskalasi konflik. Indikator utama interdependensi kompleks seperti berkurangnya peran militer, tidak adanya hirarki isu, dan banyaknya saluran komunikasi antaraktor terkonfirmasi dalam hubungan bilateral ini. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik dan ekonomi menjadi strategi utama Indonesia dalam mempertahankan stabilitas dan mencapai kepentingan nasional di tengah ancaman kedaulatan.

Kata Kunci: Indonesia, Tiongkok, Complex Interdependence.

ABSTRACT

Tensions between Indonesia and China in the North Natuna Sea have escalated following China's unilateral claim based on the nine-dash line map. This claim is considered a threat to Indonesia's national sovereignty and security. Despite these tensions, Indonesia continues to enhance economic cooperation with China, raising questions about the dynamics of their bilateral relations. This study aims to analyze why Indonesia is increasing economic cooperation with China following China's unilateral claims in the North Natuna Sea. Using a qualitative approach and a single case study method, the research applies the theory of complex interdependence by Keohane and Nye as the analytical framework. The findings reveal that, despite ongoing maritime disputes, economic and political interdependence plays a central role in de-escalating potential conflicts. Key indicators of complex interdependence—reduced role of military force, absence of issue hierarchy, and the presence of multiple channels of communication—are evident in the bilateral relationship. The study implies that diplomatic and economic approaches are Indonesia's

main strategies to safeguard national interests while maintaining regional stability amid sovereignty threats.

Keywords: *Indonesia, China, Complex Interdependence.*

PENDAHULUAN

Tiongkok menggunakan peta tradisional sebagai justifikasi klaim maritim secara sepihak di berbagai wilayah Laut Cina Selatan, salah satunya adalah di wilayah perairan Natuna. Tiongkok secara tegas menyatakan bahwa Natuna merupakan bagian dari daerah tradisional perikanan Tiongkok. Oleh karena itu Tiongkok merasa berhak mengirim armada perikanan dan penjaga pantai ke wilayah tersebut (Nursalim et al., 2023; Perwita et al., 2021; Putranti, 2018). Klaim yang dilakukan oleh Tiongkok ini tidak diakui oleh Indonesia dan juga UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Indonesia menyatakan bahwa klaim Tiongkok tidak berdasarkan hukum yang jelas dan melanggar UNCLOS 1982. Indonesia mendapat ancaman keamanan dan stabilitas akibat adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Masuknya kapal nelayan yang melakukan illegal fishing dan kapal cost guard merupakan ancaman keamanan dan stabilitas bagi Indonesia. Terlepas dari ketegangan yang terjadi di Natuna Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang fluktuatif. Indonesia masih menjaga hubungan baik dengan Tiongkok terutama dalam bidang kerjasama ekonomi dalam rangka melaksanakan kepentingan nasionalnya (Meyer et al., 2019).

Presiden Joko Widodo memiliki kepentingan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global, dengan menjalin hubungan kerja sama dengan Tiongkok yang telah menjalin kerja sama dengan negara-negara Asia ((Alunaza SD et al., 2017). Kerjasama Indonesia di bidang perdagangan dengan Tiongkok terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terdapat 12.200 proyek yang meningkatkan nilai investasi Tiongkok di Indonesia hingga mencapai USD 23,35 Miliar (Investasi, 2023). Pada tahun 2021 nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai 124,34 miliar dollar AS dengan peningkatan mencapai 58,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat ke-5 sebagai negara pengekspor ke Tiongkok dan naik menjadi peringkat ke-3 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat sebanyak 70% sementara impor Indonesia dari Tiongkok juga meningkat hingga 47% (Beijing 2022). Pada tahun 2023 Indonesia melaksanakan pertemuan bilateral dengan Tiongkok untuk membahas kerjasama investasi, pembangunan infrastruktur, kemitraan dan perdagangan. Pertemuan ini menghasilkan Nota Kesepahaman di bidang ekonomi digital (Koehane & Nye, 2011). Selain ekonomi digital pertemuan ini juga membahas mengenai target perdagangan bilateral yang diharapkan dapat meningkat hingga USD100 miliar. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok yang saling menguntungkan bagi kedua negara (Indonesia, 2023).

Anacaman keamanan yang didapatkan oleh Indonesia telah berlangsung sejak klaim sepihak dilakukan oleh Tiongkok. Sejak tahun 2010 kapal-kapal ikan Tiongkok mulai masuk ke wilayah ZEE Indonesia. Pada tahun 2019 Tiongkok melakukan 6 kali pelanggaran IUU Fishing dan pelanggaran oleh cost guard di wilayah perairan Natuna. Peringatan yang

diberikan oleh Indonesia tidak membuat Tiongkok menghentikan aksinya dan mengulangi pelanggaran yang sama hingga tahun (Wardana et al., 2020). Ditengah ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara, tidak membuat hubungan keduanya menjadi buruk (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2022). Hubungan kerjasama kedua negara dalam bidang ekonomi dapat dikatakan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia selalu berusaha menjaga hubungan bilateral dengan Tiongkok meskipun mendapat kerugian setelah terjadinya klaim sepihak oleh Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai kebijakan Indonesia yang terus meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok maka penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian yaitu: Mengapa Indonesia Meningkatkan Hubungan Kerjasama Ekonomi dengan Tiongkok Pasca Klaim Sepihak yang Dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus tunggal. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami fenomena hubungan ketergantungan antara Indonesia dan Tiongkok secara komprehensif dalam konteks pasca klaim sepihak Tiongkok atas wilayah Laut Natuna Utara. Studi ini memfokuskan perhatiannya pada dinamika diplomasi, kerja sama ekonomi, dan aspek politik yang terjadi antara kedua negara. Teori utama yang digunakan sebagai landasan analisis adalah *Complex Interdependence Theory* dari Keohane dan Nye, yang menjelaskan hubungan antarnegara melalui indikator peran kekuatan militer, hierarki isu, dan jalur komunikasi antarmasyarakat.

Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen, pernyataan resmi, berita internasional, jurnal ilmiah, serta laporan pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang relevan sejak tahun 2010 hingga 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria inklusi berupa dokumen yang secara eksplisit membahas hubungan Indonesia–Tiongkok dalam konteks konflik di Laut Natuna dan kerja sama ekonomi bilateral. Sampel utama terdiri dari dokumen diplomatik, transkrip pertemuan bilateral, publikasi resmi kementerian, serta literatur akademik dari jurnal bereputasi.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar analisis dokumen yang dikembangkan berdasarkan tiga indikator utama teori interdependensi kompleks. Uji validitas dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai jenis publikasi: akademik, media resmi pemerintah, dan laporan internasional. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode *content analysis* berbasis tematik. Peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk membantu mengkode, mengelompokkan, dan menarik pola dari data yang diperoleh. Hasil analisis dikaji secara interpretatif dan disajikan dalam bentuk narasi tematik sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**The Role of Force: Diplomasi Maritim Sebagai Instrumen Utama di Laut Natuna**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.499 pulau dan luas wilayah mencapai 7 juta km². Di antara total wilayah tersebut terdapat 2,55 juta km² wilayah ZEE Indonesia. Laut Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan (Sanjiwani, 2022). Sengketa perairan yang ada di Natuna melibatkan penjaga pantai Indonesia dan juga Tiongkok sejak tahun 2010. Konflik utamanya berasal dari kegiatan penangkapan ikan oleh Tiongkok hingga tahun 2020. Dalam sejumlah kasus, ketegangan muncul saat Indonesia melakukan tindakan penegakan hukum untuk mengusir nelayan dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sehingga melibatkan Penjaga Pantai Tiongkok dan menimbulkan ketegangan diplomatik antara keduanya. Sejak tahun 2020, konflik juga melibatkan kegiatan pengeboran minyak di wilayah tersebut, dengan Tiongkok memberikan respons tegas, menyebabkan timbulnya sengketa diplomatik tambahan antara kedua negara. Peningkatan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan selama dekade sebelumnya sejalan dengan pertumbuhan yang signifikan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan China (Agusman, 2023).

Presiden Indonesia, Joko Widodo, memiliki kepentingan untuk menjadikan Indonesia sebagai sumbu maritim dunia. Dalam menjalankan kepentingannya Indonesia melakukan berbagai macam diplomasi. Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga dilakukan oleh pihak militer. Diplomasi dilakukan dalam rangka mencapai kepentingan nasional yaitu untuk mencegah konflik. Diplomasi Pertahanan (Defense Diplomacy) adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh kelompok militer. Kegiatan ini melibatkan kerja sama militer pada isu-isu strategis (Dipua et al., 2021). Diplomasi pertahanan juga melibatkan aktor non-negara tetapi juga organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Diplomasi ini berbeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer. Saat ini, diplomasi pertahanan telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara (Dipua et al. 2021).

Angkatan Laut Indonesia memiliki Strategi Diplomasi Pertahanan (STRAD) yang diimplementasikan dengan latihan militer contohnya adalah Komodo Exercises. Latihan ini diadakan oleh Angkatan Laut Indonesia dengan tema "Kerjasama untuk Memperkuat Keamanan Maritim Internasional," fokus pada latihan bukan perang dan bertujuan meningkatkan interoperabilitas antara angkatan laut berbagai negara untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayah tersebut. Latihan ini memungkinkan militer yang tidak bersenjata untuk mencapai koordinasi yang lebih baik. Dalam latihan ini, Angkatan Laut dari berbagai negara bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan skenario misi bantuan kemanusiaan, seperti Proyek Aksi Sipil Medis (MEDCAP), Proyek Aksi Sipil Teknik (ENCAP), dan latihan Operasi Penjagaan Perdamaian Maritim (MPKO). Latihan Komodo bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk mendukung perdamaian dan menjaga stabilitas di tingkat regional dan global (Dipua et al. 2021).

Salah satu implementasi STRAD oleh Angkatan Laut Indonesia adalah melalui pertemuan. Pada MNEK kedua pada tahun 2016, Angkatan Laut Indonesia juga menjadi tuan

rumah untuk Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat ke-15 (WPNS) dengan tema "Kemitraan Maritim untuk Stabilitas di Wilayah Pasifik Barat." Para ahli dan praktisi berbagi pengetahuan dan wawasan tentang keamanan maritim dan stabilitas di wilayah tersebut. Dalam upaya mendukung keamanan maritim, negara-negara regional umumnya mencari kerja sama dan kemitraan untuk menghadapi ancaman apa pun. Semua negara menyadari bahwa mereka tidak dapat menghadapi tantangan tersebut sendirian. WPNS adalah forum penting untuk mengimplementasikan kemitraan maritim regional yang memerlukan dasar yang kuat dan saling percaya antara negara-negara atau angkatan laut. Pemilihan Indonesia sebagai mediator lebih diterima oleh semua pihak karena Indonesia bukanlah negara yang mengajukan klaim (non-Claimant state), dan Indonesia berperan sebagai pemimpin normatif di wilayah tersebut yang sering dipercayai untuk memediasi konflik (Dipua et al. 2021).

Situasi di Laut Natuna Utara faktanya tidak sepanas di Kepulauan Sparty. Permasalahan yang terjadi di natuna seperti penangkapan ikan ilegal dan kapal asing yang memasuki wilayah Natuna. Tetapi permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan diplomasi yang terus dilaksanakan oleh TNI AL. Permasalahan ini berhasil diatasi dengan mengadakan pertemuan dan mencapai kesepakatan dalam penanganan masalah tersebut. Indonesia juga memiliki Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan pesawat udara TNI AL yang terus berpatroli di kawasan Laut Natuna Utara (Sarah et al., 2022). Pada tahun 2020 Indonesia pernah mengeluarkan tiga kapal perang untuk mengusir kapal ikan Tiongkok yang melakukan pencarian ikan ilegal di Natuna. Pada tahun 2020 TNI AL juga mengadakan latihan rutin yang juga diikuti oleh kelompok alutista. TNI AL mengerahkan 2000 anggota dan 26 Kapal Perang Indonesia serta kendaraan tempur lainnya. Latihan bersama dengan angkatan laut Jepang yang disebut sebagai Passing Exercise (Passex) juga dilakukan di wilayah ZEE Indonesia. Latihan bersama ini merupakan bentuk diplomasi militer dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia juga terus melakukan upaya diplomasi melalui forum internasional seperti KTT ASEAN, ASEAN-China, dan melakukan pertemuan bilateral dengan Tiongkok. Indonesia terus mengupayakan diplomasi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (Sulistiyani et al., 2021).

Absence of Hierarchy among Issues: Hubungan Kerjasama Indonesia dan Tiongkok

Hubungan Indonesia dan Tiongkok melibatkan aspek-aspek ekonomi, keamanan, lingkungan dan politik. Secara umum hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok bersifat kompleks. Meskipun terdapat sengketa wilayah di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok, yang merupakan bagian dari Laut China Selatan, keduanya berusaha menjaga agar hubungan tetap kondusif. Selain itu, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok juga semakin meningkat. Tiongkok menjadi mitra dagang yang signifikan bagi Indonesia, dan keduanya telah terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama ekonomi, termasuk investasi Tiongkok di sektor-sektor seperti infrastruktur dan energi di Indonesia. Laut China Selatan melibatkan berbagai isu, seperti klaim wilayah, hak pengeboran minyak dan gas, keamanan maritim, dan kebebasan berlayar. Isu-isu ini tidak diatur secara hierarkis, tetapi saling terkait

dan mempengaruhi satu sama lain. Indonesia dan Tiongkok telah berupaya untuk mengatasi isu-isu ini melalui diplomasi dan kerjasama (Farras 2023).

Kerjasama Indonesia dan Tiongkok tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam hal transisi energi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengadakan pertemuan untuk memperdalam kerja sama dalam transisi energi dengan Tiongkok. Dialog ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian, Indonesia Institute for Essential Services Reform (IESR), BRI International Green Development Coalition (BRIGC), dan organisasi hukum lingkungan internasional. Dialog ini menjadi dasar untuk laporan yang akan diterbitkan oleh IESR, BRIGC, dan ClientEarth tentang peran Tiongkok dalam mempercepat transisi energi Indonesia (Simanjuntak, 2023). Pertemuan bertujuan untuk mencari kesepakatan dalam membangun kerja sama, terutama di sektor energi. Antara tahun 2006 hingga 2022, investasi Tiongkok di Indonesia mencapai sekitar USD 35 miliar (Simanjuntak 2023).

Selain kerjasama dalam bidang energi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia juga berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki kerjasama internasional di bidang ekonomi dengan Indonesia. Tiongkok secara konsisten muncul sebagai mitra dagang utama untuk anggota ASEAN. Beberapa negara ASEAN bergantung kepada Tiongkok sebagai sumber impor salah satunya adalah Indonesia. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok secara resmi. Tiongkok sangat diakui sebagai pasar besar dengan konsumen yang cukup banyak. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok semakin erat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan Indonesia. Tiongkok merupakan mitra impor utama Indonesia dengan nilai impor yang tinggi. Hubungan Ekonomi Indonesia dan Tiongkok tergambarkan dalam data impor, dengan Tiongkok yang menduduki peringkat atas dalam beberapa tahun terakhir (Umagapi, 2017).

Nilai impor Indonesia pada tahun 2022 meningkat sebesar lebih dari US\$ 40 juta atau 29% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari adanya impor migas yang meningkat hingga 80% dan non migas sebesar 21%. Tiongkok merupakan negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia (Putri, 2022). Hubungan Indonesia dan Tiongkok melibatkan aspek-aspek ekonomi, keamanan, lingkungan dan politik. Secara umum hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok bersifat kompleks. Meskipun terdapat sengketa wilayah di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok, yang merupakan bagian dari Laut China Selatan, keduanya berusaha menjaga agar hubungan tetap kondusif. Selain itu, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok juga semakin meningkat. Tiongkok menjadi mitra dagang yang signifikan bagi Indonesia, dan keduanya telah terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama ekonomi, termasuk investasi Tiongkok di sektor-sektor seperti infrastruktur dan energi di Indonesia. Laut China Selatan melibatkan berbagai isu, seperti klaim wilayah, hak pengeboran minyak dan gas, keamanan maritim, dan kebebasan berlayar. Isu-isu ini tidak diatur secara hierarkis, tetapi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Sebagai bagian dari WTO Indonesia dan Tiongkok selalu memegang prinsip untuk menguntungkan satu sama lain, dan meningkatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Tiongkok saat ini menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan menjadi salah satu dari sumber investasi terbesar Indonesia. Hasil kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral antara keduanya sangat menguntungkan. Pada tahun 2020, total perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia mencapai 78,37 miliar dolar AS, meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Di tahun 2021, total volume perdagangan mencapai 124,34 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 58,4%, menempati posisi pertama di antara negara-negara ASEAN. Tiongkok telah menjadi mitra perdagangan terbesar Indonesia selama 9 tahun berturut-turut dan tujuan ekspor terbesar selama 6 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 3,2 miliar dolar AS. Selain memberikan dukungan keuangan, kedua negara terus memperkuat kerjasama di bidang teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan bidang lainnya (He et al., 2023).

Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan sektor maritim diperkuat oleh potensi yang dimiliki keduanya. Indonesia memiliki visi poros maritim dunia, sementara Tiongkok mengusung jalur sutera yang diadvokasi oleh Presiden Xi Jinping. Nota kesepemahaman terkait pertahanan dan keamanan maritim, yang ditandatangani melalui Komite Kerjasama Maritim (KKM), menjadi landasan kerjasama tersebut. Aspek kerjasama mencakup keselamatan pelayaran, termasuk pertukaran informasi, penyediaan layanan penyelamatan pelayaran, dan dialog kerjasama berkelanjutan. Selain itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan untuk meningkatkan keamanan maritim (Farras, 2023).

SIMPULAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah perairan di kawasan Laut Cina Selatan yaitu Laut Natuna Utara. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok berdasarkan peta tradisional milik Tiongkok. Sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS Indonesia tidak mengakui adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Klaim yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan hal yang tidak berdasar pada hukum internasional. Adanya klaim sepihak tersebut Indonesia mendapat ancaman keamanan dan stabilitas. Banyaknya kapal nelayan Tiongkok dan kapal Cost Guard yang masuk ke wilayah Perairan Natuna merupakan ancaman yang sering terjadi. Meskipun Indonesia mendapat ancaman keamanan dan stabilitas pasca klaim sepihak di kawasan Laut Natuna Utara, Indonesia tetap memilih untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan kerjasama yang semakin erat ditandai dengan meningkatnya hubungan ekonomi seperti impor dan investasi. Selain bidang ekonomi Indonesia juga meningkatkan kerjasama di bidang energi.

Hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok merupakan hubungan saling ketergantungan yang complex (Complex Interdependence). Interdependensi kompleks ditandai dengan tiga indikator. Pertama kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen utama dalam penyelesaian konflik (the role of force). Dalam sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok penggunaan kekuatan militer oleh kedua negara sangat minim. Kedua negara memaksimalkan hubungan diplomasi dan pertemuan bilateral untuk menyelesaikan konflik.

Meskipun penggunaan kapal perang Indonesia tetap ada di wilayah Natuna tetapi tidak digunakan untuk menyerang Tiongkok. Kedua yaitu tidak adanya hierarki dalam isu antara kedua negara (Absence of Hierarchy among Issues). Dalam hubungan internasional klasik isu keamanan merupakan isu utama. Tetapi dalam interdependensi kompleks isu keamanan bukanlah isu utama yang menjadi kepentingan kedua negara. Dalam kasus ini isu kerjasama di berbagai bidang menjadi yang utama bagi Indonesia dan Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, D. D. (2023). Natuna Waters: Explaining a Flashpoint Between Indonesia and China. *Indonesian Journal of International Law*, 20(4), 617–648. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.4.1>
- Alunaza SD, H., Sarifudin, M., & Rahayu, D. S. (2017). The Strategic Cooperation between Indonesia and Tiongkok under Jokowi's Foreign Policy towards Global Maritime Diplomacy. *Strategic Cooperation*, 1–16. <https://pdfs.semanticscholar.org/69c4/381295384369beaff7f9b95bb7192e1cbaf3.pdf>
- Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., & Prakoso, L. Y. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. *Italienisch*, 11(2), 120–126.
- Farras, A. N. (2023). Hubungan Interdependensi Indonesia-China Di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara. *Indonesian Perspective*, 8(1), 96–120. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56381>
- He, G., Qilin, Z., & Xin, Y. (2023). Trade Cooperation Between China and Indonesia in the Context of Carbon Border Tax: Current Situation and Prospect. *MANDARINABLE: Journal of Chinese Studies*, 2(1), 39–52. <https://doi.org/10.20961/mandarinable.v2i1.609>
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2023). *Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Sepakati Kerja Sama Di Bidang Ekonomi Digital*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5374/indonesia-dan-republik-rakyat-tiongkok-sepakati-kerja-sama-di-bidang-ekonomi-digital>
- Investasi, K. K. B. K. dan. (2023). *Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok Melalui Two Countries Twin Parks (TCTP)*. <https://maritim.go.id/detail/tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-indonesia-tiongkok-melalui-two-countries-twin-parks-tctp>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia, B. (2022). *Kinerja Perdagangan Indonesia Dengan Tiongkok Tahun 2021 Menggembirakan*. https://www.kemlu.go.id/beijing/id/news/18380/kinerja_perdagangan-indonesia-dengan-tiongkok-tahun-2021-menggembirakan
- Koehane, R. O., & Nye, J. S. (2011). *Power and Interdependence* (4th, Ed.). Pearson.
- Meyer, P. K., Nurmandi, A., & Agustiyara, A. (2019). Indonesia's Swift Securitization of the Natuna Islands How Jakarta Countered China's Claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*, 27(1), 70–87. <https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1590724>
- Nursalim, M., Puspoayu, E. S., & Hikmah, N. (2023). Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 139–160.
- Perwita, A. A. B., Ian Montratama, S. E., & MEB, M. S. (2021). *Pengelolaan Pertahanan Perbatasan Maritim Kepulauan Natuna*. Jakad Media Publishing.
-

- Putranti, I. R. (2018). Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 4(4), 868–877.
- Putri, A. M. H. (2022). Impor Indonesia Melonjak, China Tetap Number One! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221130083016-128-392344/impor-indonesia-melonjak-china-tetap-number-one>
- Sanjiwani, N. P. A. (2022). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 66–85. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.42>
- Sarah, S., Widodo, W., & Yusnaldi, Y. (2022). Indonesia's Security Dilemma in the Tension Between the United States and China in the South China Sea Conflict. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 6(1), 44. <https://doi.org/10.24036/jess.v6i1.396>
- Simanjuntak, U. (2023). INDONESIA-CHINA Energy Transition Cooperation, First Of Its Kind High-Level Dialogue. *Jakarta*. <https://iesr.or.id/en/indonesia-china-energy-transition-cooperation-first-of-its-kind-high-level-dialogue-to-advance-renewable-energy-cooperation-between-indonesia-and-china>
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Umagapi, J. L. (2017). The Rise of China-Indonesia Relationship: Soft Power, Resources, and Prospect in the Future. *Indonesian Perspective*, 2(2), 131. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18475>
- Wardana, N. K., Wiranto, S., & Adriyanto, A. (2020). Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Keamanan Maritim*, 6(2), 203–229. <https://medium.com/@kajian.strategi.energi/>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).